



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: PKS/25/I/2026/UNHANRI
NOMOR: 5/HM.04.01/2026
TENTANG
PENGUNAAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S-1) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (20-01-2026), bertempat di Bogor dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. NUGRAHA GUMILAR, M.Sc** selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Perencanaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: KEP/1487/M/IX/2025 tanggal 30 September 2025, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf
Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-1 dari 10 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah universitas yang diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang pertahanan negara dan bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “CAT BKN”) dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan



Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026; dan

- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026 melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026 berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026.



(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus sidang verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menyusun dan menyerahkan soal TKD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menjaga kerahasiaan soal dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. melakukan verifikasi data diri peserta dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- h. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima soal TKD yang disusun **PIHAK KESATU** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;



- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- e. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1. nilai TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Sarjana (S-1) di Lingkungan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Tahun Anggaran 2026.
- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menyiarkan hasil *livescore* CAT BKN melalui media *streaming*;
- i. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- j. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.



Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penetapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e bersifat final serta tidak dapat dilakukan pengajuan penjadwalan ulang.
- (3) Penyerahan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan hanya melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen **PIHAK KEDUA** kepada Panitia Seleksi Instansi Pusat **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi BKN dan Tim Seleksi UNHAN RI.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh peserta seleksi.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unhan RI
Alamat : Gedung Dekanat C, Kampus Bhineka Tunggal Ika,
Kawasan *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)*
Sentul, Bogor, Jawa Barat
Telepon : (021) 87951555
Faksimile : -
Email : unhanriakademik@gmail.com



b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah

menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang

Paraf
Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-9 dari 10 halaman

mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DR. NUGRAHA GUMILAR, M.Sc

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.